

ANALISIS PEMBENTUKAN PASANGAN IRMAN YASIN LIMPO-ANDI ZUNNUN ARMIN NH PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2020

Wardah Ardhillah, Armin, Sukri

Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: wardhillah@gmail.com, armin09111965@gmail.com, sukripolitik@gmail.com

Abstrak

Pemerintahan negara pada hakekatnya adalah pemerintahan rakyat, yaitu suatu pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Pemilihan umum merupakan salah satu proses demokrasi yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Beberapa negara di dunia sangat mementingkan peran seluruh masyarakat dalam berpartisipasi penuh dalam politik. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis dinamika politik pengaruh Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid terhadap pencalonan pasangan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH sehingga terbentuk menjadi pasangan calon pada Pemilihan Walikota Makassar 2020. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Metode yang digunakan deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan kajian pustaka. Data dianalisis menggunakan perspektif new institutional dan teori elite. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Nurdin Halid (NH) dalam pencalonan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH (Pasangan IMUN), mempunyai pengaruh. Dalam hal ini ketokohan SYL selaku mantan gubernur, selaku kakak Irman Yasin Limpo, memberikan pengaruh pada pencalonan pasangan IMUN tersebut. Namun secara kelembagaan SYL, tidak mempunyai pengaruh. Berbeda dengan Nurdin Halid, mempunyai peran secara kelembagaan, karena beliau merupakan wakil ketua umum DPP partai Golkar yang mengusung Pasangan IMUN tersebut dan partai pengusung (Golkar, PAN dan PKS) tidak menjadikan wacana ketidakharmonisan Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid sebagai acuan untuk menentang pasangan tersebut terbentuk.

Kata Kunci: dinamika politik; pilkada; peran elite politik

Abstract

The state government is essentially a people's government, a government formed by the people and for the benefit of all the people. Elections are one of the democratic processes that require public participation. Some countries in the world attach great importance to the role of the entire society in participating fully in politics. This research aims to illustrate and analyze the political dynamics of the influence of Syahrul Yasin Limpo and Nurdin Halid on the candidacy of Irman Yasin Limpo and Andi Zunnun Armin NH so that it is formed as a candidate pair in the 2020 Makassar Mayoral Election. This research was conducted in Makassar city. Methods used descriptive analytics with qualitative approach. Data is collected

through in-depth interviews and literature studies. The data was analyzed using a new institutional perspective and elite theory. The results showed that Syahrul Yasin Limpo (SYL) and Nurdin Halid (NH) in the nomination of Irman Yasin Limpo and Andi Zunnun Armin NH (IMMUNO Pair), had influence. In this case, the ketokohan SYL as a former governor, as Irman Yasin Limpo's brother, had an influence on the candidacy of the IMMUNO pair. But institutionally SYL, has no influence. Unlike Nurdin Halid, has an institutional role, because he is the deputy chairman of the Golkar party DPP that carries the IMMUNO Pair. And the party of supporters (Golkar, PAN and PKS) did not make the discourse of disharmony Syahrul Yasin Limpo and Nurdin Halid as a reference to oppose the pair formed.

Keywords: *political dynamics; pilkada; role of political elite*

Pendahuluan

Salah satu prinsip dasar penyelenggaraan negara yang dipilih oleh rakyat Indonesia adalah demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk konstitusi yang mengakui bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Berdasarkan asas ini, pemerintahan negara pada hakekatnya adalah pemerintahan rakyat, yaitu suatu pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Pemilihan umum merupakan salah satu proses demokrasi yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Beberapa negara di dunia sangat mementingkan peran seluruh masyarakat dalam berpartisipasi penuh dalam politik. Kesempurnaan partisipasi politik hanya dapat dilihat dengan menyerahkan pilihan kepada rakyat. Semua demokrat harus membuat pilihan mereka sebanyak mungkin tanpa halangan apapun.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan wujud dari sarana demokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis. Sepanjang jalan ini, sistem demokrasi yang dianut masyarakat Indonesia tidak terlepas dari berbagai bentuk hambatan yang kerap menimbulkan ketidakpedulian terhadap masyarakat pada umumnya.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota merupakan ajang bagi seluruh masyarakat untuk menjalankan proses penggantian kepemimpinan sehingga sangat penting bagi masyarakat dalam wilayah setempat. Pada sisi masyarakat inilah kesempatan untuk mengevaluasi pemimpin sebelumnya dan memilih siapa pemimpin yang berikutnya. Sedangkan dari sisi partai politik merupakan kesempatan untuk melakukan seleksi terhadap kader-kader partai terbaik. Serta untuk masyarakat yang memilih jalur perseorangan, inilah kesempatan untuk menggalang dukungan bagi kader daerah menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota.

Sistem demokrasi elektoral kaderisasi dan rekrutmen merupakan bagian terpenting dalam keseluruhan sistem politik. Dalam titik inilah sistem pencalonan menjadi menarik untuk dikaji bagaimana sistem internal partai dibangun untuk membina kadernya dan bagaimana partai politik melakukan seleksi kadernya untuk menjadi calon. Demikian halnya dengan sejumlah orang yang memilih jalur perseorangan untuk meyakinkan masyarakat untuk menjadi bakalcalon. Fakta membuktikan bahwa pada tahapan pencalonan begitu banyak persoalan muncul dan

menjadi fenomena menarik untuk dikaji. Dalam periode pemilihan serentak tahun 2015 dan 2017, masalah pencalonan muncul menghiasi halaman media massa dan media sosial. Bakal pasangan calon dari partai politik yang di calonkan penuh intrik saling jegal antara kader partai maupun bukan kader partai politik. Demikian pula dengan proses bakal calon dari perseorangan yang harus merebut simpati masyarakat ([Respationo & Hamzah, 2013](#)).

Dinamika politik dalam pencalonan walikota dan wakil walikota pada Pemilihan Makassar 2020, bakal maju empat pasangan calon. Mereka tersebut adalah Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi, Syamsu Rizal-Fadli Ananda, Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH dan Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando ([Rozikin, 2017](#)).

Dari empat pasangan calon tersebut, salah satunya menarik perhatian penulis. Yaitu pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH, pada pasangan tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Irman merupakan adik dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, sedangkan Andi Zunnun merupakan anak dari Politikus Golkar, Nurdin Halid.

Pada pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH, memiliki kerabat yang kurang harmonis yaitu Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid. Tapi tidak ada musuh abadi dalam politik, dalam Pemilihan Walikota Makassar 2020 berpeluang menyatukan keduanya. Hal tersebut terjadi setelah Partai Golkar mengusung Irman Yasin Limpo dan direkomendasikan berpasangan dengan Andi Zunnun Armin NH di Pemilihan Walikota Makassar 2020 ([Syaf, 2017](#)).

Ketidakharmonisan kerabat mereka dapat dilihat dari sejarah pertarungan kedua kerabat mereka. Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid, keduanya nyaris tidak tak pernah sehaluan, walaupun sama-sama dibesarkan Partai Golkar. Pada suksesi Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2003 merupakan cerita pembuka ketidakharmonisan Nurdin Halid dan Syahrul Yasin Limpo. Saat Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2003, Partai Golkar mempasangkan HM Amin Syam-Syahrul Yasin Limpo. Nurdin Halid yang sejak awal tak respek dengan pasangan ini berbelok haluan. Ia turut mencalonkan diri dengan menggandeng Iskandar Mandji. Lengkapnya lagi, pria kelahiran Bone ini merangkul Ilham Arief Sirajuddin, politisi muda partai beringin, untuk mendukungnya di Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2003. Karena ideologi politik yang sejalan, Ilham Arief Sirajuddin dengan berani turut membangkang pada keputusan Golkar. Sayang, cerita ini berakhir dengan kekalahan Nurdin. Setelah kalah di suksesi, Nurdin berlabuh ke kancah politik nasional. Sejak itulah rentetan ketidakharmonisan dengan Syahrul terus abadi ([Lagaligopos, 2017](#)).

Di Pemilihan Walikota Makassar 2013, Nurdin Halid kembali terlibat pertarungan dengan Syahrul Yasin Limpo. Nurdin Halid menginginkan Supomo Guntur dengan adik kandungnya (Kadir Halid) menjadi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013. Sementara Syahrul Yasin Limpo menolak keras Kadir Halid sebagai pasangan calon Supomo, Ia menginginkan mantan Sekretaris Kota Makassar itu dipasangkan dengan Farouk M Betta. Tapi campur tangan DPP memutuskan “perkawinan paksa” Supomo-Kadir ([Candra, 2014](#)).

Syahrul Yasin Limpo membuka poros baru ia mendorong adik kandungnya, Irman Yasin Limpo (None) bertarung di Pemilihan Walikota Makassar 2013. None maju berpasangan dengan Busrah Abdullah. Poros dadakan ini memutus keseimbangan Partai Golkar. Misi Syahrul Yasin Limpo mengacak-acak soliditas Golkar Makassar berhasil. Suara Supomo Guntur-Kadir Halid rendah. Namun sayang poros Syahrul Yasin Limpo juga harus menerima kenyataan bahwa gagal mengatasi elektabilitas Danny Pomanto-Syamsu Rizal yang disokong oleh Ilham Arief Sirajuddin, sehingga memenangi Pemilihan walikota Makassar 2013. Sama-sama mengalami kegagalan tidak lantas memutus gesekan politik keduanya. Nurdin Halid terus bergerilya di DPP. Sementara Syahrul Yasin Limpo semakin menancapkan pengaruhnya di Sulawesi Selatan (Rusnaedy & Purwaningsih, 2018).

Fakta bahwa DPP memecah belah partai Golkar, termasuk kubu Abrisal Bakri dan Agung Laksono sejak 2014, sekali lagi menimbulkan perselisihan antara Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Khalid. Puncaknya, ketika Syahrul Yasin Limpo memutuskan maju di Munas Golkar tahun 2016. Namun karena gagal di munas, Syahrul Yasin Limpo menghadapi sentimen friksi politik dari kubu Setya Novanto. Setelah Syahrul Yasin Limpo lengser didoronglah Nurdin Halid menjadi plt Ketua Golkar Sulawesi Selatan. Pergantian ini terjadi saat Partai Golkar sedang menghadapi dua momen politik krusial, Musda Golkar Sulawesi Selatan dan Pilgub 2018. Banyak kader menyebut pergantian itu “kudeta” untuk memutus pengaruh imperium Yasin Limpo di Sulawesi Selatan (Tella, 2016).

Nurdin Halid dipandang bermanuver untuk mengganggu kepentingan Ichsan Yasin Limpo, yang disiapkan menjadi penerus Syahrul Yasin Limpo di Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018. Benar saja, Nurdin yang sudah mengalkulasi kekuatan Ichsan Yasin Limpo di DPD II menunda musda sampai waktu yang belum ditentukan. Misinya untuk membelah soliditas DPD II setidaknya efektif padasaat itu. Golkar Sulawesi Selatan pelan-pelan ia kendalikan dan para loyalis Syahrul Yasin Limpo mulai ia rangkul (Jamil, 2016).

Dari sejarah yang diwacanakan Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid yang tidak harmonis. Namun, mereka pernah menjalani penerbangan dengan satu pesawat, mereka juga terlihat akrab saat bertemu. Selain itu, mereka juga berada pada Partai yang berbeda, Syahrul Yasin Limpo dari Partai Nasdem dan Nurdin Halid dari Partai Golkar serta partai dari SYL mendukung kandidat lain. Tetapi dalam Pemilihan Walikota Makassar 2020, keluarga mereka bersatu dalam pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020 (Mubarak, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah penulis berusaha untuk menjelaskan dinamika politik yang terjadi dalam pencalonan pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH sehingga pasang ini terbentuk menjadi pasagan calon, dengan batas penelitian pengaruh elite politik dalam hal ini Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid dalam pencalonan ini. Dalam judul Analisis Pembentukan Pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH Pada Pemilihan Walikota Makassar 2020.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Pengaruh Elite politik terhadap pencalonan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH di Pemilihan Walikota Makassar 2020.

Pada pendekatan penelitian kualitatif ini akan lebih banyak mementingkan segi proses daripada hasil. Oleh karena itu, akan dilihat dan dianalisis bagaimana pengaruh Elite politik terhadap proses pencalonan Irman Yasin Limpo di Pemilihan Walikota Makassar 2020. Pada proses tersebut setiap langkah yang dilakukan untuk menggali informasi yang berkenaan dengan pengaruh Elite politik terhadap pencalonan Walikota Makassar 2020 akan diteliti, sehingga diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, dan dapat dipercaya serta lebih bermakna.

Adapun jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik analisis data, peneliti melakukan analisis data bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, akan banyak data dan informasi yang akan diperoleh selama penelitian di lapangan, peneliti akan melakukan reduksi data dari hasil wawancara dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting bagaimana pengaruh Elite politik terhadap pencalonan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH di Pemilihan Walikota Makassar 2020.

Hasil dan Pembahasan

Masyarakat yang dinamis, selalu ada berbagai kebutuhan dan dukungan spontan. Tuntutan individu, tuntutan kelompok masyarakat pada instansi pemerintah (superstruktur politik). Permintaan ini bergantian sesuai dengan preferensi masing-masing kelompok yang selalu bersemangat untuk permintaan tersebut. Pada tataran sistem politik nasional, persyaratan berbagai kelompok kepentingan harus ditegakkan dengan kuat sesuai dengan pedoman konstitusi. Dalam hal ini, gerakan klaim tidak dimaksudkan untuk mengganggu negara dan menghancurkan tatanan politik, ekonomi, dan hukum, tetapi klaim tersebut merekonstruksi struktur politik dan ekonomi, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerancuan dinamika dalam masyarakat (A Kambo & Bailusy, 2009).

Jika melihat sejarah, keluarga Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH (Pasangan IMUN) keduanya hampir tak pernah sehaluan, keluarga mereka hampir selalu berlawanan politik. Namun pasangan IMUN ini bisa maju sebagai calon walikota dan wakil walikota, sehingga dalam pencalonan pasangan tersebut melalui kompromi yang ada. Dari pihak Partai Golkar tidak mempermasalahkan mengenai kabar bahwa kedua keluarga Pasangan IMUN di wacanakan kurang harmonis. Menurut Nasaruddin Upel persoalan Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid yang sebelumnya hampir selalu berlawanan politik tidak menjadikan keduanya bermusuhan (Aswin, 2017).

Wakil Sekretaris Partai Golkar Sulawesi Selatan juga mengungkapkan dalam politik apapun bisa terjadi, kapanpun bisa berubah. Dalam politik juga tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada adalah kepentingan. Jadi, ketika Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH dibentuk menjadi calon walikota dan wakil walikota Makassar 2020. Partai tidak menentangnya walaupun sejarah keluarga pasangan IMUN ini hampir selalu berlawanan politik.

Melihat sejarah Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid yang hampir selalu berlawanan politik. Namun kedua figur Sulawesi Selatan sering di wacanakan bertemu, dari pertemuan-pertemuan mereka adakah membahas tentang strategi pemenangan setelah kedua keluarga mereka resmi ditetapkan oleh KPU sebagai calon walikota dan wakil walikota Makassar 2020.

Menurut Farouk M. Betta pertemuan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Nurdin Halid (NH), tidak pernah membahas strategi Pemenangan Irman Yasin Limpo (None) dan Andi Zunnun Armin NH pada Pemilihan Walikota Makassar 2020 setelah resmi ditetapkan oleh KPU. Meskipun None merupakan adik kandung SYL dan Andi Zunnun merupakan anak kandung NH. Ketua DPD II Golkar Makassar juga mengungkapkan Pertemuan-pertemuan kedua figur Sulawesi Selatan hanya sebatas silaturahmi saja (Sobirin, Nuhuyanan, Maldun, Abdullah, & Sukadar, 2013).

Menurut Nasruddin Upel menyatakan bahwa pada tingkatan ketokohan Syahrul Yasin Limpo selaku mantan Gubernur, selaku adik Irman Yasin Limpo. Ada pengaruhnya, partai memberikan dukungannya pada kandidat tersebut, tetapi secara kelembagaan tidak ada. Karena partai Syahrul Yasin Limpo tidak mengusung Irman Yasin Limpo. Berbeda dengan Nurdin Halid, partainya mengusung kandidat dan secara langsung ikut terlibat menentukan calon walikota dan wakil walikota. Karena beliau adalah wakil ketua umum DPP Partai Golkar.

Menurutnya, kedua figur tersebut adalah Tokoh Politik Nasional Sulawesi Selatan, tentu memiliki pengaruh yang besar terhadap apapun yang terjadi di Republik ini. Bukan hanya di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan, yang mana kita ketahui keduanya secara politik selama ini tidak bersama. Tetapi di Pemilihan Makassar 2020, keluarga mereka bersatu di Pemilihan Walikota Makassar 2020. Namun belum tentu Syahrul Yasin Limpo menggerakkan instrumen jaringan dan keluarganya untuk bekerja memenangkan Irman Yasin Limpo dan Nurdin Halid pada Pemilihan Walikota Makassar 2020. Karena beliau bukan kader partai pengusung walaupun Irman Yasin Limpo adalah adik kandungnya sendiri.

Perspektif new institutional membuka ruang aspek formal dan informal. Dimana dalam penelitian ini, terbentuknya pasangan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH (Pasangan IMUN) di Pemilihan Walikota Makassar 2020. Bukan hanya disebabkan pada aspek formal saja, akan tetapi ada aspek informal yang ikut mempengaruhi sehingga Pasangan IMUN tersebut terbentuk.

Karena jika melihat pada aspek formalnya, maka tidak akan ada masalah jika pasangan ini terbentuk. Baik dari segi UU maupun dari AD/ART Partai Pengusung, tidak ada aturan yang melarang mereka menjadi pasangan calon. Akan tetapi karena

Irman Yasin Limpo merupakan adik kandung dari Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Andi Zunnun Armin NH merupakan anak kandung dari Nurdin Halid (NH). Dan kedua elite politik (SYL dan NH) tersebut sering berlawanan politik dan berada pada partai yang berbeda, SYL dari Partai NasDem dan Partainya mendukung kandidat lain serta NH dari Partai Golkar.

Selain itu, dimana Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid yang diwacanakan kurang harmonis. Akan tetapi mereka pernah menjalani penerbangan dengan satu pesawat, mereka juga terlihat akrab saat bertemu. Berdasarkan hal tersebut, ada aspek informal (diluar aturan) yang ikut mempengaruhi terbentuknya pasangan calon ini. Hal itu dapat dilihat bahwa Irman Yasin Limpo merupakan adik kandung Syahrul Yasin Limpo. Dari fakta itu dapat mempengaruhi tingkat pemilihan di mata pemilih, walaupun secara langsung Syahrul Yasin Limpo tidak memberikan arahan-arahan kepada Partai pengusung Pasangan IMUN tersebut.

Karena ketika pasangan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH terbentuk, ini dianggap sebagai representasi kekuatan yang ada pada elite dibelakang mereka sehingga terbentuk menjadi pasangan calon. Dalam aspek formal, Partai memiliki pertimbangan, kriteria, syarat, mekanisme, tata cara dan penilaian-penilaian tersendiri dalam memberikan dukungannya. Contohnya di partai Golkar. Pada tahapan awal, Partai Golkar akan membuka pendaftaran bagi para calon yang ingin mendapatkan dukungan dari Partai untuk Pemilihan Walikota Makassar. Para calon yang mendaftar akan mengisi dan mengembalikan formulir sesuai dengan ketentuan Partai.

Para calon yang telah mengembalikan formulir pendaftaran akan di seleksi oleh tim yang dibentuk oleh DPD II Partai Golkar Makasar. Tim tersebut yang akan menilai para calon mulai dari kapabilitas, komitmen dan sebagainya. Kemudian nama-nama yang lulus seleksi akan dikirim dan diseleksi lagi ketingkatan selanjutnya. Dalam Partai Golkar memiliki Juklak (petunjuk pelaksanaan) pada masing-masing tingkatannya. Baik Golkar Kota Makassar, Golkar Provinsi Sulawesi Selatan dan Golkar Pusat memiliki dinamika dan ketentuan tersendiri.

Pada tingkatan kabupaten/kota (DPD II Partai Golkar Kota Makassar) partai menyeleksi para calon dengan melakukan rapat pleno. Rapat pleno tersebut dilakukan mulai dari kelurahan, kecamatan dan DPD II Partai Golkar Makassar. Pada rapat DPD II, Partai akan menyeleksi minimal 3 nama. Nama-nama yang lulus seleksi pada tingkatan kabupaten/kota akan dikirim ke tingkatan wilayah.

Pada tingkatan wilayah (DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan) para calon akan melaksanakan *fit and proper test* berupa tes wawancara, uji kompetensi oleh para pakar dan akademisi yang ada di Makassar. Dari hasil tes tersebut di *scoring*, nama-nama yang lulus seleksi dikirim lagi ketingkatan pusat. Di tingkatan Pusat (DPP Partai Golkar) yang akan menentukan calon walikota Makassar yang direkomendasikan oleh Partai Golkar.

Sejalan dengan hal itu Menurut Robert D. Putnam, Kelompok elit dapat diidentifikasi menggunakan tiga pendekatan. Pertama, analisis terhadap jabatan formal,

khususnya pada jabatan resmi pemerintah. Yang kedua adalah analisis reputasi yang lebih informal di masyarakat. Ketiga, perannya dalam analisis keputusan, terutama dalam membuat atau menolak keputusan politik. Selain memiliki kekuasaan, kelas ini juga menguasai sebagian besar sumber dayanya, sehingga kelompok elite ini dapat dianggap sebagai aktor politik utama (Putnam, 2000).

Para ahli sepakat bahwa elite akan menggunakan tiga sumber daya utama untuk mengkonsolidasikan kekuasaan sebagai aktor politik utama: ideologi, kekuasaan, dan ekonomi. Dengan ideologi, elite mengadvokasi dan mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang diikutinya, memukul massa dan tanpa menggunakan kekerasan. Seiring dengan ekonomi, elit akan memenuhi kebutuhan massa, dengan demikian membenarkan kekuatan elite. Dengan sekuat tenaga, para elite menaklukkan massa yang menolak kepemimpinan mereka (Suwarta & Adam, 2012).

Penelitian yang berjudul “Peran Elite Politik Lokal Terhadap Masyarakat Menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2014 Di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar” Oleh Hendra Pratama, Tahun 2014. Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran elite politik lokal terhadap masyarakat menjelang Pemilihan Presiden tahun 2014 di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar ? 2) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap peran elite politik lokal dimasyarakat menjelang pemilihan presiden tahun 2014 di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar?. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran elite politik lokal terhadap masyarakat di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan persepsi masyarakat terhadap peran elite politik lokal dimasyarakat menjelang pemilihan presiden tahun 2014. Hasil penelitian ditemukan peran elite politik lokal (*governing elite*) terhadap masyarakat yaitu dengan cara memberikan arahan kepada masyarakat agar pada pemilihan presiden tahun 2014 hak suaranya digunakan agar terciptanya pemilihan presiden yang sempurna dan tidak golput (golongan putih) karena menentukan nasib Negara lima tahun kedepan. Adapun persepsi masyarakat terhadap elite politik lokal adalah adanya kecenderungan dalam memihak calon presiden yang didukungnya. Cara-cara yang mereka lakukan yaitu membagi-bagikan kostum kampanye (baju, topi, dan rompi), memberikan arahan kepada pemilih pemula dan meminta dukungan kepada keluarga dan kerabat agar bisa memilih calon presiden yang didukungnya pada saat pemilihan presiden tahun 2014.

Sedangkan penelitian penulis, berjudul “Analisis Pembentukan Pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH Pada Pemilihan Walikota Makassar 2020” Masalah dalam penelitian ini : Bagaimana dinamika terbentuknya Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH sehingga menjadi pasangan calon di Pemilihan Walikota Makassar 2020?. Dengan tujuan penelitian untuk melihat bagaimana pengaruh Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid terhadap pencalonan pasangan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH sehingga menjadi pasangan calon pada Pemilihan Walikota Makassar 2020 yang notebenanya elite politik dibelakang mereka merupakan kerabat mereka sendiri yang pada sejarah diwacanakan kurang harmonis.

Menurut Pareto, setiap masyarakat dijalankan oleh sejumlah kecil orang yang memiliki kualitas yang mereka butuhkan untuk memiliki kekuatan politik penuh. Mereka yang telah mampu mencapai pusat kekuasaan adalah yang terbaik. Mereka mungkin memiliki kekuatan terbesar dalam masyarakat. Pareto juga percaya bahwa elite dari berbagai profesi dan tingkat sosial diambil dari kelas yang pada dasarnya sama: kaya, cerdas, dan lebih menguntungkan daripada masyarakat umum. Jadi, menurutnya, masyarakat terdiri dari dua kelas: yang pertama adalah kelas atas, elite pemerintah dan elite non-pemerintah. Sebagai seorang pemuka agama dan seorang pemuda. Pemimpin, pemilik, dan lain-lain. Kedua, kelas bawah adalah orang-orang bodoh seperti masyarakat pada umumnya dan kaum tani (Nuzula, 2016).

Dalam kondisi tertentu, ada karakteristik yang membedakan antara elite satu dengan yang lainnya. Yaitu kemampuan untuk memimpin dan menjalankan kontrol politik. Jika elite prestisius dilumpuhkan dan orang-orang di luar kelompok menjadi kompeten di masyarakat, elite yang berkuasa saat itu dapat digulingkan dan digantikan oleh elite baru. Hal ini dapat dengan mudah ditumbangkan oleh kelompok baru yang nantinya akan menjadi elit baru masyarakat, karena dalam kondisi tertentu posisi elite dapat didiskreditkan di mata masyarakat (Amin, 2017).

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian dan hasil penelitian dilapangan mengenai Analisis Pembentukan Pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH Pada Pemilihan Walikota Makassar 2020. Maka penulis menyimpulkan bahwa persoalan Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid yang hampir selalu berlawanan politik tidak menjadikan keduanya bermusuhan. Sehingga Partai Setuju Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Armin NH menjadi calon walikota dan wakil walikota Makassar 2020. Pengaruh Syahrul Yasin Limpo dan Nurdin Halid menurut sekretaris Tim Pemenang IMUN pada tingkatan ketokohan Syahrul Yasin Limpo selaku mantan Gubernur, selaku adik Irman Yasin Limpo ada pengaruhnya. Tetapi secara kelembagaan tidak ada, karena partai beliau tidak mengusung pasangan IMUN tersebut, dan partai beliau mengusung kandidat lain. Berbeda dengan NH, partai beliau mengusung pasangan IMUN tersebut dan merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, yang ikut terlibat langsung menentukan pasangan IMUN secara kelembagaan. Walaupun secara langsung Syahrul Yasin Limpo tidak memberikan arahan-arahan kepada Partai Pengusung Pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH.

BIBLIOGRAFI

- A Kambo, Gustiana, & Bailusy, Muh Kausar. (2009). *Komitmen Ekologis Pemerintah Daerah Dalam Proses Kebijakan Publik Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. [Google Scholar](#)
- Amin, Khairul. (2017). Elit dan Kekuasaan pada Masyarakat Desa. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 11(2), 167–187. [Google Scholar](#)
- Aswin, Aswin. (2017). *Implikasi Pemberhentian Syahrul Yasin Limpo sebagai Ketua Umum DPD SUL-SEL terhadap Eksisten Partai Golongan Karya SUL-SEL*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. [Google Scholar](#)
- Candra, Akbar. (2014). *Kekuatan politik lokal dalam kemenangan Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada pemilihan Gubernur 2013 Daerah Pemilihan Kabupaten Gowa*. Doctoral dissertation. [Google Scholar](#)
- Jamil, Fadly. (2016). *Strategi Komunikasi Politik Pilkada Gowa 2015 (Studi Kasus Kemenangan Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, SH dan H. Abd Rauf Malaganni S. Sos., M. Si)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. [Google Scholar](#)
- Lagaligopos. (2017). NurdinHalid Vs Syahrul Yasin Limpo, Cerita Panjang Seteru Dua Orang Kuat Lokal. Retrieved from Lagaligopos.com website: <http://lagaligopos.com/read/nurdin-halid-vs-syahrul-yasin-limpo-cerita-panjang-seteru-dua-orang-kuat-lokal/>. [Google Scholar](#)
- Mubarak, Dinul Fitrah. (2019). Konstruksi Teks Pemberitaan Calon Gubernur Sulsel Periode 2018 Pada Harian Fajar (Studi Pada Berita Tentang Penjaringan Cagub). *Jurnal Diskursus Islam*, 7(1), 1–20. [Google Scholar](#)
- Nuzula, Nur. (2016). *Politik elite Nahdlatul Ulama (Nu): pemihakan dalam pemilihan presiden (Pilpres) Tahun 2014*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah. [Google Scholar](#)
- Putnam, Robert D. (2000). Bowling alone: America's declining social capital. In *Culture and politics* (pp. 223–234). Springer. [Google Scholar](#)
- Respationo, H. M. Soerya, & Hamzah, M. Guntur. (2013). Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(2). [Google Scholar](#)
- Rozikin, Mohamad Toufikur. (2017). *Implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Surabaya dalam proses pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah Kota Surabaya tahun 2015*. UIN Sunan Ampel Surabaya. [Google Scholar](#)
- Rusnaedy, Zaldy, & Purwaningsih, Titin. (2018). Keluarga Politik Yasin Limpo Pada

Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015. *Jurnal Politik*, 3(2), 301–322. [Google Scholar](#)

Sobirin, S. S., Nuhayanan, Reza, Maldun, Syamsuddin, Abdullah, Wawan, & Sukadar, Yoshi. (2013). *Empat Tahun Perjalanan Wakil Rakyat Kota Makassar* (Vol. 1). Sah Media. [Google Scholar](#)

Suwirta, Andi, & Adam, Arlin. (2012). Membincang kembali masalah etnisitas, nasionalitas, dan integrasi nasional di Indonesia. *Atikan*, 2(2). [Google Scholar](#)

Syaf, Edy Junaedy. (2017). Pertarungan Simbol Identitas Etnis Sebagai Komunikasi Politik Dalam Pilkada Kota Makassar. *Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 215–224. [Google Scholar](#)

Tella, Rahmat Ilmi. (2016). *Respon Elit Partai Golkar Makassar Terhadap Dualisme Kepemimpinan DPP Pusat: Studi Tentang Kubu Aburizal Bakrie dan Kubu Agung Laksono*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. [Google Scholar](#)

Copyright holder:

Wardah Ardhillah, Armin, Sukri (2021)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

